UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

BABII
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Telekomunikasi Indonesia

Cikal bakal TELKOM adalah suatu badan usaha bernama Post-en Telegraafdlents yang didirikan dengan Stadsblad No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Bahkan sampai tahun 1950 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan staatsblad No. 395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah post-, Telegraaf en Telefoondients atau disebut PTT-Dienst. PTT-Dienst ditetapkan sebagai perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijvenwet (I.B.W. Undang-undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No.19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia, tentang persyaratan suatu perusahaan Negara dan PTT-Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan, bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.B dilebur kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi).

Dalam Perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi untuk menjadi 2(dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, maka berdirilah Perusahaan Pos dan Giro (PN. Pos dan Giro) dan pendirian Perusahaan

Negara Telekomunikasi (PN. Telekomunikasi) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Bentuk inipun dikembangkan menjadi Perusahaan Umum (Perum)Telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan pula Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat), yang masih berstatus perusahaan asing, yakni dari American Cable & Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari American Cable & Radio Corporation. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980 , PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk umum Internasioal.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (PERUM)

dialihkan menjadi perusahaan perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 9 tahu 1969. Sejak itulah berdirilah Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM.

2.2 Restrukturisasi Internal Telkom

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional, maupun regional, maka TELKOM pada tahun 1995 ini melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerja Sama Operasi (KSO) dan persiapan Go Public Offering. Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya Bidang usah TELKOM dibagi tiga, yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama adalah TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan bidang terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS), sirkit langganan , teleks, penyewaan transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu.

Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan ada juga yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan bidang terkait, yang termasuk dalam bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti, riset teknologi informasi.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara defacto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network, Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatera
2. Divisi Regional II, Jakarta dan Sekitarnya
3. Divisi Regional III, Jawa Barat
4. Divisi Regioanal IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional V, Jawa Timur
6. Divisi Regional VI, Kalimantan
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan Divisi-Divisi pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti, Divisi Sistem Informasi.

Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan maka struktur dan fungsi kantor pusat diubah menjadi pusat **biaya** (**cost** centre). Berlakunya kebijakan dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia Kantor Perusahaan juga menjadi lebih sedikit.

Kantor Perusahaan TELKOM berdasarkan akte perubahan yang terakhir berkedudukan di Jl. Japati No.1 Bandung, bertanggung jawab atas penyampaian sasaran pengelolaan perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Divisi, Kantor Perusahaan hanyalah menetapkan hal – hal yang strategis, sedangkan penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing – msaing Divisi.

Struktur manajemen TELKOM, secara garis besar meliputi Kantor Perusahaan, Divisi Regional I s/d VII, Divisi Network, dan Divisi Pendukung. Kantor Perusahaan strukturnya sangat sederhana, hanya terdiri dari Dewan Direksi, yang dibantu Kelompok Pengembangan Bisnis, Sekretaris Perusahaan Kepala Audit Internal dan beberapa Vice President.

2.3 Kegiatan Usaha

Jasa telekomunikasi yang disediakan TELKOM dibagi dalam dua kelompok, yaitu jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar.

Pengelompokan inipun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi telekomunikasi dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama TELKOM sampai saat ini adalah menyediakan PSTN (Public Switch Telephone Network) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN.

Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai 1995 ini adalah :

1. Jasa Telepon Dalam negeri,
2. Jasa Interkoneksi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain,
3. Jasa Telepon Bergerak Selular,
4. Jasa Satelit,
5. Jasa Lainnya.

Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan kegiatan usaha TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi, biaya pasang, biaya abodemen (langganan) bulanan dan biaya pemakain telepon untuk panggilan lokal jarak jauh. Dari catatan tahun 1994 tenyata kontribusi terbesar berasal dari pemakaian telepon. Pelayanan jasa telepon dalam negeri ini juga termasuk penyediaan Telepon Umum, baik kartu maupun coin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam negeri, TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggara telekomunikasi internasional dan STBS (sistem Telepon Bergerak selular).

Pendapatan Interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT. INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan Interkoneksi, TELKOM juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan transponder Satelit, mulai 1996 akan beralih kepada SATELINDO, namun TELKOM terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT, e-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan penggunaan faksimili. Menghadapi kondisi ini TELKOM pun sudah menandatangani memorandum of understaning dengan PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1995 mengenai pengalihan pengoperasian dan pengelolaan usaha telegraf.

Kerja sama Operasi

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya, maka TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya. Partisipasi swasta sampai saat ini di kenal dalam bentuk pola bagi hasil (PBH), perusahaan patungan dan Kerja Sama Operasi (KSO). KSO ini merupakan suatu organisasi kemitraan yang tidak membentuk suatu badan hukum, namun tetap sebagai suatu divisi dari TELKOM. Divisi-divisi dari KSO meliputi Divisi Regional I Sumatra, Divisi Regional III Jawa Barat, Divisi Regional IV Jawa Tengah & DIY, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Kepulauan, Divisi KSO dikelola oleh mitra KSO, yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri. Masa KSO ditetapkan selama 15 tahun dan pada akhir masa KSO seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan mitra KSO yang berkaitan dengan sarana/jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan dialihkan kepada TELKOM. Dari 5 juta SST yang harus dibangun selama repelita 6, 2 juta SST akan dilaksanakan oleh Mitra KSO.

Initial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menjual Saham TELKOM, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52, tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh notaris Imas Fatimah, SH. Untuk itu TELKOM Mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange dan London Stock Exchange.

Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun juga.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan Saham Seri B Atas Nama dan dapat dipindah tangankan.

Dalam kaitan IPO ini, khusus karyawan TELKOM mendapat penjatahan khusus sejumlah Saham Seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10%(sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran Umum di Indonesia. Program Pemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock Ownership Plan (ESOP), mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan (1 Tahun) setelah pencatatan saham pada Bursa Efek jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih dari Emisi saham baru akan digunakan untuk membiayai program investasi perusahaan. Sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral,

penambahan kapasitas dan pengembangan jarinagn kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan wireless local loop. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia.

Semua usaha TELKOM ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik Regional maupun Internasional, peningkatan kemampuan kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan TELKOM menjadi salah satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia (World Class Operator).

2.4 Deskripsi Jabatan

Deskripsi pekerjaan dari setiap bagian pada struktur organisasi di KANDATEL Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi (KAKANDATEL)

   Tujuan utama pekerjaan adalah bertanggung jawab atas pencapaian sasaranoperasional penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu.

   Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

   a. Menyusun strategi bisnis
   b. Mengelola sistem informasi dan kesekretariatan
   c. Membina sumberdaya manusia
   d. Mengelola keuangan
   e. Mengelola logistik

f. Mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki perangkat jaringan kabel

g. Mengelola jasa telekomunikasi

2. Kepala Bagian Program Manajemen

Tujuan utama pekerjaan adalah bertanggung jawab mengendalikan mutu pengelolaan sistem manajerial secara terpadu untuk mendukung ketepatan pengambilan keputusan KAKANDATEL.

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Mengendalikan dan mengkonsolidasikan kegiatan semua Dinas/Bagian Kandatel serta memonitor seluruh pelaporan dan action plan yang ada/dibuat

b. Mengintegrasikan pelaporan dari seluruh dinas/bagian

c. Menganalisa dan mengevaluasi laporan sebagai bahan dalam manajemen meeting, rekomendasikan pengambilan keputusan KAKANDATEL dan mendistribusikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan

d. Membuat laporan perkembangan Operasional Kandatel

e. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran

f. Kewenangan akses ke semua Bagian

3. Kepala Urusan Perencanaan Bisnis & Quality Assurance

Tujuan utama pekerjaan adalah bertanggung jawab dalam menyusun Business Plan KANDATEL serta penyelenggaraan fungsi manajemen umum lainnya.

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan semua Dinas/Bagian

b. Menyusun masukan kepada KANDATEL
c. Menyusun dan merekomendasikan RJP serta melaksanakan Rolling Plan
d. Menyusun dan merekomendasikan RKA KANDATEL berdasarkan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran seluruh Dinas/Bagian/Urusan
e. Menyusun dan merekomendasikan pengembangan Jasa Baru
f. Melaksanakan Administrasi dan perhitungan kinerja KANDATEL
g. Melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja KANDATEL
h. Melakukan evaluasi penggunaan metoda baru bidang perencanaan
i. Menganalisa proses produksi, proses pelayanan dan operasional yang ada, mengembalikan atau menyempurnakannya.

4. Kepala Urusan Kesekretariatan dan Public Relation

Tujuan utama pekerjaan adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepurelan, dokumentasi dan perpustakaan, menyusun anggaran bagian, hukum dan perikatan.

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan release dengan pihak luar perusahaan dalam hal kebijakan-kebijakan perusahaan yang perlu diinformasikan
b. Membuat surat edaran kegiatan upacara dan mendistribusikannya ke seluruh Bagian/Dinas
c. Penomoran surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia
d. Menjawab complain pihak luar

5. Kepala Urusan Sistem Informasi (SISFO)

   Tujuan utama pekerjaan adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Informasi Pelayanan dan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan di KANDATEL.

   Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

   a. Memberikan kecepatan dan ketepatan proses dan pelaporan
   b. Menciptakan performance system secara keseluruhan
   c. Mengembangkan aplikasi pelayanan sejalan dengan kemajuan iptek.

6. Kepala Urusan Analisa Data & Laporan

   Tujuan utama pekerjaan adalah bertanggung jawab atas penyajian data operasional secara tepat dan akurat.

   Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

   a. Mengoperasikan aplikasi sistem pelaporan yang terintegrasi dengan seluruh Dinas
   b. Menyajikan data operasional KANDATEL untuk kepentingan internal maupun eksternal
   c. Membuat laporan perkembangan operasional KANDATEL
   d. Bekerja sama dan akses keseluruh sistem informasi yang dimiliki (SIM,MIS)

7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

   Tujuan utama pekerjaan adalah menyediakan dukungan kepada unit-unit kerja KANDATEL dalam perencaaan, pendayagunaan, pengembangan dan pengadministrasian Sumber Daya Manusia.

   Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Mengusulkan promosi, penting, tenaga, mutasi, pelatihan, pemberian penghargaan dan penindakan
b. Memvalidasi input payroll
c. Melakukan koordinasi dengan Instansi Keuangan

8. Kepala Urusan Pelayanan SDM

Tujuan utama pekerjaan adalah melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, belanja pegawai, kesejahteraan pegawai & pensiunan secara efektif & efisien untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran dan target-target KANDATEL.

Rincian kegiantannya adalah sebagai berikut :

a. Menangani penggajian, BPFP/BBP, Restitusi pengobatan, lembur dan SPPD
b. Memberikan saran dalam penyelesaian suatu masalah keryawan
c. Merekomendasikan hukuman disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran.

9. Kepala Urusan Pengembangan Competensi SDM dan HRMIS

Tujuan utama pekerjaan adalah melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pembinaan SDM untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah para pegawai guna mendukung pencapaian sasaran dan target KANDATEL.

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Merekomendasikan perencanaan kebutuhan SDM
b. Merekomendasikan program pengembangan karir dan pelatihan
c. Membuat usulan pengawakan, promosi, kenaikan tingkat, kenaikan gaji serta penempatan.

10. Kepala Bagian Keuangan

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinir penyusunan, pengendalian anggaran dan pelaporan realisasinya
b. Mengelola perbendaharaan yang meliputi pengelolaan kas & bank, kegiatan penagihan dan pengelolaan/administrasi/pengawasan pendapatan
c. Menyajikan Laporan Keuangan yang meliputi kegiatan akuntansi, jurnal, general ledger, kertas kerja keuangan, penyajian neraca, rugi laba, analisa sumber/penggunaan dana dan ratio keuangan
d. Melaksanakan Administrasi Keuangan.

11. Kepala Bagian Logistik

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Mengusulkan anggaran biaya dan stock persediaan suku cadang, peningkatan mutu gedung dan bangunan, pengadaan KBM dan biaya operasi serta pemeliharaannya
b. Menetapkan pemenang dalam proses pengadaan sesuai dengan kewenangannya
c. Mengusulkan pemenang pada proses pengadaan ke KAKANDATEL
d. Mengusulkan promosi/pengembangan staf
e. Menyeleksi/memilin rekanan
f. Menilai kinerja staf

12. Kepala Dinas Operasi Pemeliharaan Sentradaya

Rincian kegaiatannya adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan operasi pemelihraan perangkat SENPON, TELEX, TRANSMISI, Catu Daya dan perbaikan perangkat serta pengendalian network

b. Mengkoordinasikan pengoperasian dan pemeliharaan sentradaya.

13. Kepala Dinas Operasi dan Pemeliharaan Akses Pelanggan

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan kabel (Jarkab)

b. Mengusulkan penambahan kapasitas jarkab

c. Menerbitkan SPK dan penunjukkan Waspang untuk pelaksanaan pekerjaan yang diborongkan kepada pihak ketiga

d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan mira kerja (rehabilitasi/peningkatan mutu jarkab).

14. Kepala Dinas Niaga

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran/penjualan dan pelayanan jasa telekomunikasi

b. Merekomendasikan target dan strategi/kebijakan operasional pemasaran/pelayanan berdasarkan strategi bisnis KANDATEL

c. Menetapkan prioritas PSB

d. Membina hubungan baik dengan wartel dan penyelenggara jastel lainnya